

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DILIHAT DARI RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL,
RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DAN RASIO EFEKTIFITAS
(Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021-2022)**

**Rini Utari¹, Anisa Nursyabani², Hurun In³, Royke Bahagia Rizka⁴, Sandy
Kurniawan⁵**

Akuntansi Perpajakan, Politeknik Pajajaran ICB, Bandung, Indonesia^{1,2,3}
riniutari82@gmail.com¹, anisanursyabani1831@gmail.com², huruniin08@gmail.com³,
royke.rizka1@yahoo.com⁴, sandi.kurniawan@poljan.ac.id⁵

Abstrak

The purpose of this study is to evaluate the financial performance of West Lampung Regency, the regional government. A quantitative descriptive approach is the research methodology employed. The budget for regional revenue in 2021 and 2022 is the data that was used. Analysis of the regional financial independence ratio, effectiveness ratio, and degree of fiscal decentralization ratio was the calculation method employed in the study. The degree of fiscal decentralization as a ratio is very low, with analysis results ranging from 0% to 10% on an interval scale. When the independence ratio falls between 0 and 25 percent, it indicates a very low level and an instructive relationship pattern. Lastly, an interval scale with $x > 100\%$ represents the effectiveness ratio in 2021.

Keywords: Financial Performance; Effectiveness Ratio; Degree of Fiscal Decentralization Ratio; and Regional Financial Independence Ratio

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Lampung Barat. Teknik deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Anggaran pendapatan daerah untuk tahun 2021 dan 2022 adalah data yang digunakan. Analisis derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas adalah teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian. Temuan analisis untuk menghitung rasio derajat desentralisasi fiskal jatuh pada skala interval dari 0%-10%, atau sangat sedikit. Di sisi lain rasio kemandirian jatuh antara 0-25%, menunjukkan pola hubungan yang sangat rendah dan instruktif. Dan yang terakhir rasio efektifitas tahun 2021 berada pada skala interval $x > 100\%$ yang berarti efektif namun pada tahun 2022 berada pada skala interval $x < 100\%$ yang berarti tidak efektif. Sehingga, hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan rasio-rasio diatas bisa mengetahui kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; rasio efektivitas; derajat rasio desentralisasi fiskal; Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan UU No. 17 Tahun 2003, yang mendefinisikan anggaran daerah sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Otonomi daerah berdampak pada banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh daerah agar dapat menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan secara mandiri dan berhasil.

Daerah perlu lebih inventif dan kreatif dalam kebijakan pemerintah sektor keuangan mereka untuk memaksimalkan otonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah harus dapat mengoptimalkan keterlibatannya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai tata kelola pemerintahan.

Mempelajari kinerja keuangan sangat penting bagi entitas sektor publik, termasuk pemerintah. Semakin berkembangnya akuntabilitas public dari lembaga negara hingga pemerintah kota dan federal, Unit kerja, departemen, dan lembaga dalam pemerintahan akan mengurangi pemborosan, kebocoran keuangan, dan inisiatif yang tidak menguntungkan. Melihat kemampuan keuangan melalui analisis matematika dan rasio adalah salah satu nilai akuntabilitas lembaga pemerintah. Untuk menentukan apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan program kerjanya dengan benar, tinjauan kinerja keuangan sangat penting dilakukan.

Pengkajian yang mendalam terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat akan menghasilkan data yang penting, terutama untuk perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan penentuan apakah pemerintah daerah tersebut telah efektif dalam mengelola keuangannya dan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio keserasian belanja merupakan beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja keuangan

Kinerja keuangan, menurut Fahmi (2012), merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai seberapa besar suatu korporasi menerapkan aturan secara efektif dan tepat. Misalnya, dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan persyaratan dan pedoman *GAAP* (*general accepted accounting principle*) atau SAK (standar akuntansi keuangan).

Pengukuran kinerja merupakan jenis pertanggungjawaban, menurut Bastian (2006), dimana persyaratan yang harus dipenuhi berasal dari evaluasi yang lebih tinggi. Selain itu, pengujian dan analisis dilakukan untuk menemukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan setelah organisasi mengumpulkan semua data.

Menurut Halim (2007), kapasitas daerah suatu daerah-yang disebut juga sebagai kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, sangat

penting untuk menganalisis rasio penerimaan keuangan terhadap pengeluaran di daerah (Mardiasmo, 2002). Mengukur kinerja keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijaksana, menciptakan akuntabilitas publik, dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Temuan analisis rasio keuangan ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengamati pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan belanja yang dilakukan selama jangka waktu. Menganalisis keberhasilan dan efisiensi menghasilkan pendapatan daerah, Menganalisis bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uang dari daerah, Hitung bagian dari setiap sumber pendapatan dalam penciptaan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan, atau evolusi keuntungan dalam pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu menurut Mahmudi (2011).

Rasio derajat desentralisasi fiskal

Tingkat desentralisasi dihitung sebagai pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Tingkat kontribusi PAD meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Rasio derajat desentralisasi fiskal =

$$\frac{PAD}{Total\ pendapatan\ daerah} \times 100\%$$

Tabel 1. Skala interval rasio derajat desentralisasi fiskal

Skala rasio derajat desentralisasi fiskal	Kemampuan keuangan daerah
00.00-10.00 %	Sangat kurang
10.01 – 20.00 %	Kurang
20.01 – 30.00 %	Cukup
30.01 – 40.00 %	Sedang
40.01 – 50.00 %	Baik
> 50.00 %	Sangat baik

Rasio kemandirian keuangan daerah

Sejauh mana suatu daerah dapat menggunakan pajak dan retribusi untuk mendanai operasi pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakatnya sendiri dikenal sebagai rasio kemandirian daerah, menurut Abdul Halim (2012). Kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan pendapat dari sumber-sumber lain, seperti pinjaman dan bantuan pemerintah pusat (transfer pusat). Hal ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan pinjaman dan bantuan pemerintah pusat.

Rasio kemandirian =

$$\frac{PAD}{bantuan\ pusat + pinjaman} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala interval rasio kemandirian dan pola hubungan

Kemampuan keuangan	Rasio kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	> 25% – 50%	Konsultatif
Sedang	> 50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75% – 100%	Delegative

Keterangan :

- 1) Pola hubungan instruktif di mana otonomi pemerintah daerah berada di bawah peran pemerintah pusat
- 2) Daerah menggunakan pola konsultatif karena dianggap sedikit lebih mampu

melaksanakan otonomi daerah, yang berarti lebih sedikit campur tangan pemerintah pusat.

- 3) Pola Hubungan Partisipatif, peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat fakta bahwa daerah yang terkena dampak hampir cukup mandiri untuk menangani masalah otonomi daerah.
- 4) Daerah sekarang benar-benar mampu dan mandiri dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah mereka berarti pola hubungan delegative yaitu intervensi pemerintah pusat tidak ada lagi.

Rasio efektifitas

Rasio efektivitas mengevaluasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan proyeksi pendapatan asli daerah terhadap target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah. Jika rasionya minimal 1 atau 100%, pemerintah daerah dianggap berada dalam posisi untuk melakukan tugasnya. Kemampuan daerah ini ditunjukkan dengan rasio efektivitas yang lebih tinggi.

Rasio efektifitas =

$$\frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. kriteria efektifitas keuangan daerah

Keterangan	Rasio efektifitas
Tidak efektif	X < 100%
Efektif berimbang	X = 100%
Efektif	X > 100%

Sumber : Mahsun (2009)

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Studi ini menempatkan penekanan kuat pada

penyajian data yang akurat dan metodis untuk melukiskan gambaran yang jelas. Penelitian yang menggunakan data untuk menjelaskan bagaimana memecahkan masalah saat ini dikenal sebagai penelitian deskriptif (Darmawan, 2013). Membuat deskripsi atau citra yang metodis, faktual, dan akurat tentang karakteristik, atribut, dan hubungan antara fenomena yang diteliti adalah tujuan penelitian deskriptif (Khireta, 2014).

Populasi penelitian terdiri dari laporan keuangan dari tahun fiskal 2021 dan 2022, yang berfungsi sebagai sumber informasi utama untuk memahami analisis manajemen keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan mereka. Sementara itu, laporan operasional dan arus kas untuk 2021–2022 adalah contoh laporan keuangan yang dikumpulkan.

Pendekatan penelitian ini untuk mengumpulkan data melibatkan penggunaan teknik dokumentasi atau teknik untuk mengumpulkan data. Pemerintah terkait mempublikasikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat periode 2021–2022 di situs webnya, <https://ppid.lampungprov.go.id>, yang merupakan tempat proses pengumpulan data dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Rasio derajat desentralisasi fiscal

Tabel 4. hasil perhitungan rasio DDF

Tahun	Pendapatan asli daerah (Rp)	Total pendapatan daerah (Rp)	Rasio DDF	Keterangan
2021	79.773.476.753,97	912.293.283.593,97	8.7%	Sangat kurang
2022	60.328.407.374,37	907.252.649.007,37	6.65%	Sangat kurang

Rasio derajat desentralisasi fiscal 2021 :

$$= \frac{PAD}{Total\ pendapatan\ daerah} \times 100\%$$

$$= \frac{79.773.476.753,97}{912.293.283.593,97} \times 100\% = 8.7\%$$

Rasio derajat desentralisasi fiskal 2022 :

$$= \frac{PAD}{Total\ pendapatan\ daerah} \times 100\%$$

$$= \frac{60.328.407.374,37}{907.252.649.007,37} \times 100\% = 6.65\%$$



Gambar 1. diagram garis rasio DDF

Rasio kemandirian keuangan daerah

Tabel 5. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan transfer/bantuan pusat
2021	79.773.476.753,97	713.176.618.613
2022	60.328.407.374,37	758.238.340.039

Pinjaman (Rp)	Rasio kemandirian (%)	Pola hubungan & kemampuan keuangan
19.653.117.250	11%	Instuktif & rendah sekali
57.991.820.750	7%	Instuktif & rendah sekali

Rasio kemandirian 2021 :

$$= \frac{PAD}{bantuan\ pusat+pinjaman} \times 100\%$$

$$= \frac{79.773.476.753,97}{713.176.618.613+19.653.117.250} \times 100\%$$

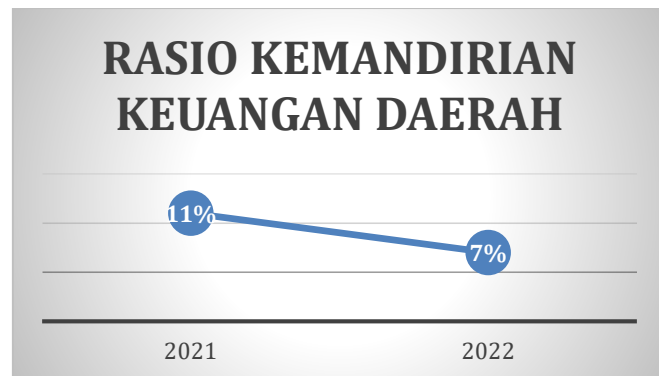
$$= 11\%$$

Rasio kemandirian 2022 :

$$= \frac{PAD}{bantuan\ pusat+pinjaman} \times 100\%$$

$$= \frac{60.328.407.374,37}{758.238.340.039 + 57.991.820.750} \times 100\%$$

$$= 7\%$$



Gambar 2. diagram garis rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio efektifitas

Tabel 6. hasil perhitungan rasio efektifitas

Tahun	Realisasi penerimaan PAD (Rp)	Target penerimaan PAD (Rp)	Rasio efektifitas	Keterangan
2021	71.498.892.557,59	67.978.328.317	105.2%	efektif
2022	70.315.342.633,28	74.228.154.471	94.7%	Tidak efektif

Rasio efektifitas 2021 :

$$= \frac{realisasi\ penerimaan\ PAD}{target\ penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{71.498.892.557,59}{67.978.328.317} \times 100\%$$

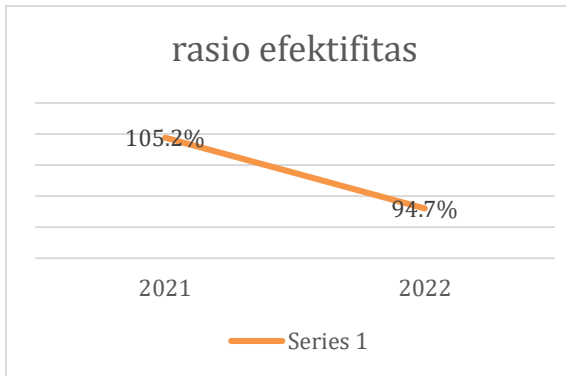
$$= 105.2\%$$

Rasio efektifitas 2022 :

$$= \frac{realisasi\ penerimaan\ PAD}{target\ penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

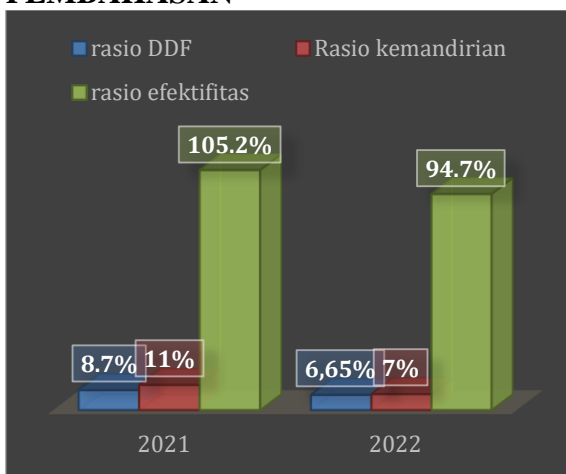
$$= \frac{70.315.342.633,28}{74.228.154.471} \times 100\%$$

$$= 94.7\%$$



Gambar 3. diagram garis rasio efektifitas

PEMBAHASAN



Gambar 4. diagram batang rasio DDF, rasio kemandirian & rasio efektifitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiscal diatas menunjukan bahwa pada tahun anggaran 2021 presentase rasio derajat desentralisasi fiscal diperoleh sebesar 8.7% dan pada tahun 2022 diperoleh rasio sebesar 6.65%. dengan demikian berarti terjadi penurunan rasio sebesar 2.05% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan pada retribusi daerah dan pendapatan hibah ditahun 2022. Berdasarkan tabel, skala rasio desentralisasi fiscal kabupaten lampung barat berada pada skala interval yang masih sangat kurang karena berada pada interval 0-10%. hal ini berarti menunjukan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan desentralisasi-nya masih kurang. Suryani, R., Andriani, N. Y., & Gunardi, G. (2023).

Lalu untuk rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten lampung barat pada tahun 2021 memiliki rasio sebesar 11% dan pada tahun 2022 rasio berada diangka 7%. berdasarkan hasil penelitian Nampak bahwa pemerintahan kabupaten lampung barat tingkat kemandiriannya mengalami penurunan. Hal ini bisa dilihat dari adanya penurunan rasio kemandirian dari 11% menjadi 7% yang mempunyai selisih 4% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya lonjakan pada pinjaman dalam negeri ditahun 2022 dengan selisih sebesar Rp 38.338.703.500 dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pemerintah belum maksimal dalam memanfaatkan Pendapatannya dan masih banyak melakukan pinjaman dana dari dalam negeri. Menurut pedoman tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dari kepmendagri tahun 1996 maka pemerintahan kabupaten lampung barat mempunyai tingkat kemampuan keuangan yang masih rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dengan kata lain daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.

Dan untuk rasio efektifitas pemerintah kabupaten lampung barat mempunyai rasio efektifitas pada tahun 2021 sebesar 105.2% dan pada tahun 2022 sebesar 94.7%. berdasarkan tabel Nampak bahwa terjadi penurunan rasio efektifitas sebesar 10.5% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintahan kabupaten lampung barat mempunyai rasio yang efektif pada tahun 2021 namun mengalami penurunan menjadi

tidak efektif pada tahun berikutnya karena berada pada skala interval $x < 100\%$ yang berarti pemerintah belum efektif dalam mengelola PAD nya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintahan daerah kabupaten lampung barat masih sangat kurang efektif. Dilihat dari menurunnya ketiga rasio jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menandakan bahwa pemerintah daerah kabupaten lampung barat masih belum maksimal dalam pengelolaan keuangannya untuk menjalankan desentralisasi-nya.

Dalam menjalankan pemerintahannya kabupaten lampung barat masih di dominasi oleh pemerintah pusat atau bahkan lebih tepatnya berada didalam pengelolaan pemerintah pusat. Dengan demikian kinerja keuangan pemerintahan kabupaten lampung barat masih dibidang sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran, T., & Pandawa, J. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). Financial Performance Analysis Using Value for Money Approach at the Tebing Tinggi District Court. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428/391>
- Azwar, A. (2023). analisis kemandirian keuangan daerah dan potensi pertumbuhan kabupaten/kota di sulawesi selatan tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan*

Publik.

- Basu, S. (2004). *No Analysis of the co-dispersion structure of health-related indicators, the center of the subject's sense of health, and the elderly people living at home*. Title. *Atmospheric Environment*, 38(5), 3395–3404. <http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.015>
- Dwi purnamasari, isnaini rodiyah. (2019). analisis kemandirian keuangan daerah kabupaten sidoarjo tahun anggaran 2010-2014. *JKMP(Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*.
- Eko amanda, zulgani zulgani. (2020). analisis kemampuan keuangan daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten musi rawas. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*.
- Suryani, R., Andriani, N. Y., & Gunardi, G. (2023). PENGARUH AKTIVITAS OPERASI DAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PT. VOKSEL ELECTRIC, Tbk YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2021. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 116-136.
- Firmansyah, F., & Aulia, A. (2020). Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i1.3043>
- Iskandar, M., & Zulhilmi, M. (2021).

Pengaruh Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal Of Shariah Economics*, 2(1).

Keuangan, L., Daerah, P., Maluku, K., & Barat, T. (2018). *Laporan hasil pemeriksaan atas. 0911*.

OnFace-LKPD-TA-2022.pdf. (n.d.).

Pt, P., Persero, P., & Malalayang, C. (2018). 3 1,2,3. *13*(2), 312–324.

Rahmad, I. (2014). *Prosedur Analisis Kinerja Keuangan*. 14–43.

Sahrudin. (2020). kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah di NTB. *Jurnal Pendidikan IPS*.

Sartika, N. (2019). analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kepulauan meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis*.

Zachari Abdallah, maryanto maryanto. (2018). evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten kerinci tahun anggaran 2008-2015. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*.